



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Februari 2022/Periodik - 2021)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN WAJO  
**UNIT KERJA** : PIMPINAN TERTINGGI

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **AMRAN MAHMUD**
2. Jabatan : **BUPATI**
3. NHK : **87211**

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 2.792.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m2/99 m2 di KAB / KOTA WAJO, HASIL SENDIRI Rp. 495.000.000
2. Tanah Seluas 6449 m2 di KAB / KOTA WAJO, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
3. Tanah Seluas 6500 m2 di KAB / KOTA WAJO, HASIL SENDIRI Rp. 72.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 92 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 1.650.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 2.75 m2/5.2 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
6. Tanah Seluas 10347 m2 di KAB / KOTA WAJO, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
7. Tanah Seluas 25000 m2 di KAB / KOTA WAJO, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN****Rp. 56.500.000**

1. MOBIL, SUZUKI APV MINIBUS Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 48.000.000
2. MOTOR, SUZUKI SEPEDA MOTOR Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000
3. MOTOR, YAMAHA 2BU XRIDE A/T 113 CC Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA****Rp. 211.575.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	4.500.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	60.536.406
F. HARTA LAINNYA	Rp.	569.500.000
Sub Total	Rp.	3.694.611.406
III. HUTANG	Rp.	368.788.686
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.325.822.720

---

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.